

MENGGAGAS PARADIGMA BARU SISTEM PENDIDIKAN MENUJU PENDIDIKAN TRANSFORMATIF DAN KOMPETITIF

ALI AKBARJONO

Abstract: *The purpose of writing a paper is as repositioning the search thread and solutions to various terms of the Indonesian education system so that a dynamic, transformative and competitive advantage. Education is an important institution for the process of preparing and improving the quality of human resources in Indonesia are qualified. Without preparing the future generations to live in an era of globalization (MEA, AEC, AFTA, etc.) with a variety of competitive advantage to have, our nation will be immersed in a world that is increasingly global pecaturan; Systemic solutions, ie solutions with changing social systems related to the education system. The education system in Indonesia today, applied in the context of the economic system of capitalism (school of neoliberalism), a principled among others minimize the role and responsibilities of the state in public affairs, including education financing; When the National Education Standards should be applied completely and correctly fit the concept. It must be through advocacy strategies sharp and thorough stakeholder commitment.*

Kata Kunci : Paradigma, Sistem Pendidikan

A. PENDAHULUAN

Persoalan pendidikan di zaman teknologi dan informasi sekarang ini dipandang sebagai problem yang sangat luar biasa sulit di berbagai negara. Walaupun demikian negara-negara yang peduli terhadap masalah ini mengakui bahwa pendidikan sebagai tugas negara yang maha penting. Dalam konteks tersebut, Bagi bangsa manapun pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan karena menentukan kemajuan sumber daya manusia yang dimilikinya. Bahkan menjadi penentu perkembangan bangsa itu sendiri. Peningkatan sumber daya manusia hanya dapat dilakukan melalui pendidikan. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh tokoh pendidikan John Dewey, “*Educational process has no end beyond itself, it is in it's own an end,*” yang berarti proses pendidikan itu tidak akan pernah berakhir. Karena dalam kehidupan sebuah bangsa, pendidikan merupakan sebuah faktor penentu dalam kemajuan dan perkembangan bangsa tersebut. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki sebuah bangsa menentukan kualitas dari bangsa itu sendiri.

Pendidikan kita mengalami krisis identitas, kehilangan paradigma, ketidakjelasan orientasi, dan berada di persimpangan jalan. Pendidikan kita menganut paradigma dikotomik. Dunia pendidikan sudah seharusnya selalu menggelorakan semangat pembaharuan dan perubahan, tetapi arah pembaharuan dan perubahannya harus memiliki paradigma yang jelas di satu sisi dan juga harus berpijak pada nilai-nilai fundamental agama dan budaya bangsa. Dengan semangat reformasi menjadikan nilai-nilai lama yang selama ini dijadikan sebagai pedoman dianggap tidak lagi relevan, sementara nilai-nilai baru belum terbentuk atau belum bisa diterima dengan baik. Produk pendidikan kita dalam satu dasawarsa terakhir juga belum membuahkan lulusan-lulusan yang reformis, modernis dan idealis. Tetapi di sisi lain rasa keIndonesiaannya dan kemodernannya juga tidak semakin baik. Orang Indonesia hilang keIndonesiaannya, guru yang tidak lagi bisa digugu dan ditiru, pemimpin hilang jiwa kepemimpinannya, tokoh masyarakat hilang keteladanannya, tontonan yang tidak mendidik menjadi tuntunan. Arah pendidikan kita tampaknya terlanjur membuang nilai, norma, etos, budaya yang lama baik yang baik dan tidak mengambil yang baru yang lebih baik.

Sejalan dengan gelombang arus Globalisasi, standar pendidikan Nasional mulai menjadi percaturan hangat di tengah masyarakat Indonesia. Banyak pro dan kontra terhadap standar pendidikan yang ada. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa problem dan tantangan pendidikan nasional dalam memasuki globalisasi harus dihadapi dengan pendekatan dan metode yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan tuntutan perubahan di masa depan. Fenomena yang terjadi pada dunia pendidikan di era globalisasi ini adalah selalu tertinggal jika dibandingkan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan dunia bisnis¹.

Dengan kemajuan peradaban manusia ditandai dengan perkembangan sistem teknologi informasi yang terus merambah kepada sistem perekonomian, politik, dan budaya suatu bangsa, antara lain kesepakatan regional, berupa masyarakat ekonomi Asean (MEA) yang telah dicanangkan pada tahun 2015. Menghadapi persaingan pasar bebas ASEAN, kesiapan bukan lagi hal yang harus dipertanyakan karena siap tidak siap Indonesia harus siap menghadapi hal tersebut. Namun dalam realitasnya masih banyak berbagai sektor yang mesti dibenahi oleh pemerintah Indonesia menghadapi persaingan tingkat ASEAN ini, terutama sektor Pendidikan.

AEC (*ASEAN Economic Community*) atau MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) merupakan kesepakatan dari Negara-negara ASEAN untuk membentuk sebuah kawasan perdagangan bebas yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan ASEAN di dunia yang rencananya akan dimulai pada akhir 2015 mendatang.

Jika kita bandingkan dengan Negara maju di ASEAN seperti Singapura, pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal. Mulai dari carut-marutnya sistem pendidikan, penerapan kurikulum yang masih baru, bahkan lulusan yang tidak tepat sasaran. Hal tersebut menjadi persoalan rumit, mengingat ketatnya persaingan yang akan terjadi.

Dari kondisi yang ada secara umum penjabaran permasalahan pendidikan di Indonesia dapat diakumulasikan dalam beberapa konteks, antara lain; (*pertama*) Sistem Pendidikan, Dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 Indonesia, tentunya akan terjadi berbagai macam perombakan dalam kementerian di Indonesia, tak terkecuali kementerian pendidikan. Hal tersebut menjadi persoalan jika diterapkannya regulasi baru dalam Sistem Pendidikan yang telah ada dan sedang berlangsung; (*kedua*), Kurikulum Baru dimana pada tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan kurikulum baru yang dikenal dengan kurikulum 2013 yang menuai berbagai macam pendapat. Ada yang pro dan ada yang kontra dengan diterapkannya kurikulum tersebut. Terlebih lagi dalam prosesnya masih terdapat banyak kendala, terutama perangkat-perangkat pendidikan yang belum siap keseluruhan; (*ketiga*) Lulusan tidak tepat sasaran, Sesuai data BPS Agustus 2013, pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 6,25 persen dan angkatan kerja di Indonesia saat itu mencapai 118, 2 juta orang. Juga masih ada lebih dari 360 ribu orang sarjana yang menganggur. Sangat riskan dan memprihatinkan memang. Hal tersebut diperparah dengan banyaknya juga lulusan yang bekerja tidak sesuai dengan bidang akademiknya, contohnya lulusan Perbankan bekerja di sektor pertanian dan sebagainya. Dengan seperti itu justru menghambat lulusan-lulusan lain yang memang sesuai dengan bidang akademiknya.

Dengan masih banyaknya persoalan tersebut, rasanya Pemerintah dan seharusnya seluruh elemen masyarakat di Indonesia mesti bekerja lebih keras untuk berbenah. Pendidikan hanya merupakan salah satu sektor yang masih banyak

permasalahan, belum lagi sektor-sektor lainnya dengan permasalahan-permasalahannya juga yang mungkin lebih rumit. Hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan bersama. Karena jika tidak, bagaimana mungkin Indonesia dapat bersaing di pasar bebas ASEAN dan menjadi macan Asia seperti sedia kala?

Tujuan penulisan makalah adalah sebagai reposisi pencarian benang merah dan solusi terhadap berbagai hal dari sistem pendidikan Indonesia agar dinamis, transformatif dan berkompetitif.

Penulisan makalah ini dilakukan secara lues dan bebas berdasarkan analisis dan pemikiran pribadi penulis yang diilhami dari bacaan-bacaan dan literatur yang relevan dengan pengelolaan pendidikan, baik bersumberkan dari bahan bacaan yang bersifat printed/ tercetak, maupun non-printed/ tidak tercetak, yaitu berupa artikel/ jurnal hasil penelitian yang upload pada berbagai website.

B. PEMBAHASAN

Pembaharuan pendidikan dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam dunia pendidikan dan menyongsong arah perkembangandunia pendidikan yang lebih memberikan harapan kemajuan kedepan, antara lain melalui beberapa strategi berikut:

REKONSTRUKSI PEMIKIRAN

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pengertian yang lebih jelas mengenai pendidikan, pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional dapat dijumpai dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini pendidikan didefinisikan sebagai "Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara"² (Pasal 1, ayat 1).

Pendidikan nasional didefinisikan sebagai "pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. (pasal 1 ayat 2).

Sedangkan yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah "keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional" (pasal 1 ayat 3). Jadi dengan demikian, sistem pendidikan nasional dapat dianggap sebagai jaringan satuan-satuan pendidikan yang dihimpun secara terpadu dan dikerahkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan merupakan human investment yang sangat strategis untuk mencetak generasi di masa mendatang. Obsesi masyarakat dengan berpengetahuan tinggi sudah menjadi sebuah keniscayaan. Melalui pendekatan bersifat inovatif, integratif dan reformis, sistem pendidikan di Indonesia secara makro menjadi tumpuan pengembangan serta pembaharuan secara sistemik, antara lain melalui pendidikan transformatif.

Pendidikan transformatif merupakan pendidikan yang melakukan proses perubahan ke arah yang lebih baik. Proses perubahan bagi dirinya (*self transformation*) maupun perubahan bagi lingkungannya (*environment transformation*)³. Disamping itu pendidikan transformatif juga menawarkan cita-cita ideal bagi dunia pendidikan dan merupakan salah satu entitas sosial yang terelasi dengan teks sosial yang melingkupinya. Artinya, konstruksi pendidikan suatu bangsa merupakan salah satu metafor kebudayaannya, yang merefleksikan ideologi dan filsafat pendidikannya. Karena itu, persoalan sosial suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari konstruksi pendidikannya yang menjadikerangka kerja proses sosial.

Dengan kemajuan peradaban manusia, secara logis dunia atau sistem pendidikan harus terus dilakukan penyegaran (*refreshmen*), antara lain melalui konstruksi pemikiran menuju pemikiran yang lebih transformatif dan berwawasan global, yakni sebuah pemikiran yang mampu membaca kondisi riil masyarakat di dunia global. Konstruksi pemikiran pendidikan di Indonesia untuk membangun manusia Indonesia yang cerdas sudah dimulai sejak Undang-undang nomer 1 tahun 1950 hingga produk undang-undang sekarang (UU sisdiknas No. 20 tahun 2003).

Tidak hanya menciptakan manusia yang cerdas intelektual saja, tetapi juga manusia yang siap menghadapi dunia global.

Disisi lain, situasi politik nasional ternyata juga mempunyai andil dalam menentukan suatu kebijakan dan memengaruhi konstruksi pemikiran. Bahwa peserta didik mampu melakukan perubahan dan pendidikan dapat mengubah peserta didik, dapat mentransformasikan nilai-nilai yang akan di sampaikan.

Perkembangan zaman berwujud pada globalisasi. Kondisi ini merupakan kecenderungan masyarakat untuk menyatu dengan dunia, terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan media komunikasi massa. Selain itu, para cendekiawan Barat mengatakan bahwa globalisasi merupakan suatu proses kehidupan yang serba luas, tidak terbatas, dan merangkum segala aspek kehidupan, seperti politik, sosial, dan ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia di dunia. Globalisasi pada hakikatnya adalah proses yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang dampaknya berkelanjutan melampaui batas-batas kebangsaan dan kenegaraan. Mengingat bahwa dunia ditandai oleh kemajemukan (pluralitas) budaya maka globalisasi sebagai proses juga ditandai sebagai suatu peristiwa yang terjadi di seluruh dunia secara lintas budaya yang sekaligus mewujudkan proses saling memengaruhi antarbudaya.

Mensikapi pengaruh globalisasi, peran peserta didik melaksanakan transformasi untuk menciptakan kondisi masyarakat yang berkeadilan dan anti diskriminasi, tujuan pendidikan kedepan perlu diorientasikan pada beberapa hal, diantaranya; (1) Membentuk kesadaran dan sikap kritis setriap peserta didik dalam merespon tuntunan pengembangan sehingga ia mampu menghadapi persaingan; (2) Melaksanakan transformasi nilai-nilai kemanusiaan; (3) Melakukan upaya gerakan sosial baru (*new social moverment*) untuk perubahan sosial; (4) Mampu menjadikan basis pertahanan karakter bangsa dan kebudayaan Nasional, di tengah kompleksitas dan persaingan antar bangsa yang semakin tajam; (5) Membentuk manusia yang cakap, kreatif, dan mandiri yang siap menghadapi tantangan perkembangan zaman seperti visi dan misi Pendidikan Nasional; (6) Menciptakan kondisi masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan.

Melihat kemelut dunia pendidikan di indonesia saat ini, tentu dalam usahanya mengawali perbaikan pun akan mengalami kesulitan yakni terkait dengan dari mana kita akan memulainya terlebih dahulu. Terlebih dengan kondisi masyarakat

yang demokratis dan pluralis ini diperlukan segudang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni.

Istilah paradigma menjadi sangat terkenal justru setelah Thomas Kuhn menulis karyanya yang berjudul *the structur of scintific revolution*. Paradigma diartikan sebagai suatu kerangka reverensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan berkembang suatu paradigma erat kaitannya dengan seberapa jauh suatu paradigma melakuka konsolidasi dan mendapat dukungan dari berbagai usaha seperti penelitian, penerbitan, pengembangan, dan penerapan kurikulum oleh masyarakat ilmiah pendukungnya.

Untuk menggagas suatu paradigma pendidikan kita kedepan ada dua hal penting yang patut dijadikan pertimbangan. *Pertama*, menyangkut soal substansial filosofis pendidikan, yaitu apa itu tujuan dilaksanakannya pendidikan?. *Kedua*, menyangkut dimensi politis, yaitu bagaimana posisi pendidikan dalam konstalasi politik nasional, apakah pendidikan akan tetap dikooptasi oleh kekuatan politik yang lebih besar, ataukah menjadi institusi yang otonom sehingga konsekuensinya adalah perlunya iklim politik maupun kebijakan yang mendukung tumbuhnya inisiatif warga untuk mengembangkan pendidikan transformatif, pentingnya pemberdayaan terhadap guru, manajemen yang berbasiskan pendidikan sekolah dan masyarakat, serta perlu dikembangkan desentralisasi pendidikan, agar baik secara subtantif maupun teknis operasional tidak sentralistis (*identik dengan Jakarta*).

OPTIMALISASI STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Kazik (1969:1) mendefinisikan sistem sebagai "organisme yang dirancang dan dibangun strukturnya secara sengaja, yang terdiri dari komponen-kumponen yang berhubungan dan berinteraksi satu sama lain yang harus berfungsi sebagai suatu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan khusus yang telah ditetapkan sebelumnya". Suatu sistem memiliki tiga unsur pokok: (1) tujuan, (2) isi atau komponen, dan (3) proses. Kalau pendidikan nasional kita benar-benar merupakan suatu sistem, maka ia setidak-tidaknya memiliki tiga unsur pokok tersebut. Di samping itu, komponen-komponen sistem tersebut harus berhubungan dan berinteraksi secara terpadu. Adapun komponen pokok dalam sistem pendidikan yaitu : tujuan dan prioritas, anak

didik (siswa), pengelolaan, struktur dan jadwal, isi kurikulum, pendidik (guru alat bantu belajar, fasilitas, teknologi, pengawasan mutu, penelitian dan biaya.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 bab 1 pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴. Dengan kata lain, setiap lembaga pendidikan dituntut untuk memenuhi kriteria minimum yang telah ditentukan. Guna tercapainya tujuan pemerataan pendidikan di wilayah hukum Negara Kesatuan republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan, haruslah ada yang menjamin dan mengendalikan mutu pendidikan sehingga sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Dalam hal ini pemerintah melakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Ketiga proses ini dilaksanakan untuk menentukan layak tidaknya lembaga pendidikan yang berstandar nasional.

Standar Nasional Pendidikan bertujuan bukan hanya untuk pemeratakan standar mutu pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesi, tetapi juga untuk memenuhi tuntutan perubahan lokal, nasional dan, global. Dikarenakan mutu pendidikan di Indonesia telah jauh tertinggal dari negara ASEAN yang lain, maka peningkatan-peningkatan di segi pendidikan akan terus terjadi. Sehingga mutu pendidikan di Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.

REALISASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN PERMASALAHANNYA

Seiring dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka terjadilah perubahan sistem pendidikan nasional guna mencapai standar minimum yang telah ditentukan pemerintah. Di samping itu terjadi penolakan Standar Nasional Pendidikan. Adapun beberapa alasan yang menyebabkan belum layaknya Standar Nasional Pendidikan diterapkan secara nacional antara lain:

Pertama, *Pertumbuhan Ekonomi yang tidak merata di Setiap Daerah*. Kenyataan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berandil besar dalam perkembangan aspek kehidupan lain, tidak terkecuali pendidikan. Namun sayangnya terkadang daerah yang memiliki hasil alam tinggi perkembangannya tidak seperti yang diharapkan. Walaupun sudah dikeluarkan UU nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi

daerah (OTDA), tapi tetap saja pembangunan di bidang pendidikan masih tidak menentu. Dikarenakan sifat pemerintah pusat tidak mempersiapkan sumberdaya untuk menjalankan sistem pendidikan yang sekarang sedang berjalan. Dengan demikian pemerintah pusat terkesan setengah-setengah dalam pemberian wewenang untuk mengurus pendidikan di daerah.

Menurut Murip Yahya (2009:80) bahwa pada dasarnya otonomi daerah memberikan peluang kepada pengelola pendidikan untuk mengembangkan lembaga pendidikan. Seperti; (a) Merumuskan tujuan institusi yang mengacu pada tujuan nasional; (b) Merumuskan dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat suatu daerah; (c) Menciptakan situasi belajar dan mengajar yang mendukung pelaksanaan dan pengembangan kurikulum yang telah ditetapkan; (d) Mengembangkan sistem evaluasi yang tepat dan akurat, baik dari prestasi siswa maupun penyelenggaraan⁵.

Kedua, *Sarana Fisik Yang Kurang Memadai*. Banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi yang keadaan gedungnya sudah tidak layak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, kurang lengkapnya koleksi buku perpustakaan. Pemakaian teknologi informasi yang kurang memadai dan sebagainya. Data Balitbang Depdiknas (2003) menyebutkan untuk satuan SD terdapat 146.052 lembaga yang menampung 25.918.898 siswa serta memiliki 865.258 ruang kelas. Dari seluruh ruang kelas tersebut sebanyak 364.440 atau 42,12% berkondisi baik, 299.581 atau 34,62% mengalami kerusakan ringan dan sebanyak 201.237 atau 23,26% mengalami kerusakan berat.

Keadaan ini juga terjadi di SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK meskipun dengan presentase yang tidak sama. Apa yang terjadi di Pulau Jawa masih sangat beruntung dibanding dengan apa yang terjadi di pulau lainnya, seperti Papua. Pengadaan sarana dan prasarana yang tidak sesuai kebutuhan mengakibatkan lambatnya peningkatan mutu pendidikan. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan daerah tertinggal (desa) daripada mengurus pendidikan di daerah maju (kota) yang jelas-jelas lebih bisa dipantau. Hal ini akan lebih memudahkan pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pendidikan yang berpaku pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Ketiga, *Pendidikan kita tidak bebas nilai*. Menurut Sukarno (2005) kebijakan pendidikan akhir-akhir ini lebih banyak ditandai oleh upaya penyesuaian struktural, namun demikian bentuk penyesuaian struktural yang diambil sering dianggap bersumber pada pilihan aliran) politik pendidikan dan pilihan tehnokratis yang mungkin⁶. Orientasi pendidikan yang dipilih secara formal adalah seperti yang termaktub dalam UUD 'mencerdaskan bangsa' dan mengembangkan potensi manusia Indonesia seutuhnya dan seluruhnya (UU 20/2003 Sisdiknas). Namun demikian, sebagian terjemahan oleh Mendiknas secara rethorik dan kebijakan Depdiknas atas orientasi itu nampaknya menekankan politik eklektis (*antara neo-konservatisme dan progresif humanistik dan sedikit orientasi radical education*), kendati mencoba menghapus kenangan 'sekolah pembangunan' yang pernah dimunculkan di jaman Orde Baru. Mendiknas agaknya mencoba mengakomodasi pertentangan orientasi politik pendidikan sehingga lebih bersifat eklektis-politis, mengambil elemen-llemen yang layak dan laik untuk dipilih secara politis.

Keempat, *Paradigma perubahan (bertaban pada status quo)*. Kekhawatiran menonjol yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu antara lain menyangkut lemahnya perbaikan mutu guru dan materi didik, serta metode pembelajaran (yang masih tradisional, khususnya untuk tujuan demokratisasi), dan lemahnya sistem evaluasi dan orientasi efisiensi eksternal, khususnya relevansinya dengan kebutuhan demokratisasi masyarakat dan pengembangan dunia usaha. Kebijakan Perbaikan kesejahteraan guru (sesuai UU Guru/dosen), sertifikasi tenaga kependidikan dan akreditasi lembaga pendidikan adalah sebuah apresiasi positif. Pertanyaan ini penting, terutama karena mewabahnya lingkungan pendidikan eksklusif, bias kelas ekonomi dan kurang pluralistik. Demikian pula, kendati otonomi Daerah/sekolah telah memunculkan inisiatif untuk mengembangkan program pendidikan atau ekstra kurikuler (misalnya life skill), inisiatif itu nampaknya lebih didorong oleh ketersediaan guru/pelatihnya atau bahkan semata-mata keinginan sekolah /daerah untuk mendapatkan in-put tambahan, daripada didasari oleh kajian potensi dan prospek ekonomi daerah yang matang (efisiensi eksternal).

Di pihak lain, khususnya pada sekolah-sekolah kejuruan dan pendidikan luar sekolah, on-the job training dan standardisasi organisasi profesi serta sertifikasi pelatihannya belumlah tertata dengan baik, sehingga kurang memberikan keyakinan

tentang tingkat kualitas lulusannya bagi calon penggunanya. Di tengah peningkatan angka pengangguran (600 ribu dalam setahun (April 2004-2005), kedua kebijakan seperti itu meningkatkan resiko terhadap nilai balik investasinya yang mahal. Siapa yang harus bertanggungjawab bila harapan masyarakat yang begitu tinggi terhadap nilai balik investasi (return on investment) tidak terwujud kelak?. Dengan membandingkan kendala (kekhawatiran) terhadap upaya pemerataan dengan kendala (kekhawatiran) terhadap upaya peningkatan mutu di atas menjadi jelas bahwa penanganan trade-off antara keduanya adalah masalah yang krusial. Kendati dalam design pemerintah keduanya diharapkan akan berjalan seiring (merata dan meningkatkan mutunya), namun secara umum terdapat prognosa bahwa mengingat kemampuan pendanaan untuk pemerataan-peningkatan mutu dan manajemen oleh pemerintah yang masih lemah, maka realitas politik Daerah dan persaingan antar (otonomi) sekolah/madrasah memperebutkan akses politik dan daya masyarakatnya itulah yang akan lebih menentukan pemerataan vis a vis peningkatan mutu pendidikan kita. Dinamika yang sekarang terlihat adalah begitu pemerintah sedikit saja melepas bagian tubuh pendidikan ke daerah dan pasar, maka oleh (otonomi) sekolah yang lebih kuat bagian itu direbut dan dijadikan komoditi yang syah bagi yang mampu. Kesenjangan agaknya akan melebar, pendidikan 'bermutu' akan lebih dinikmati kelompok mampu, kecuali pemerintah meningkat kemampuan (terutama dana) dan komitmennya untuk meredam hal tersebut. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan komitmen pada saat sekarang adalah dua 'telor' yang mendesak untuk dibuat. Namun demikian, pertanyaannya saat ini adalah: pertama, Bila sekarang negara belum mampu berperan sebagai equalizing factor, apakah civil society (lembaga sosial kependidikan di masyarakat) setelah menghadapi kebijakan negara yang terkesan kurang menekankan partnership seperti di atas, masih dapat berperan emansipatorik, atau malahan telah ikut menjadi penjual komoditi pendidikan untuk mempertahankan hidupnya? Kedua, apakah dalam dinamika seperti ini, sistem pendidikan kita telah tereduksi menjadi alat legitimasi pemilah klas sosial (sorting mechanism) dan alat reproduksi tata hubungan (kuasa) sosial-ekonomi belaka? Bila jawabnya 'ya', maka di tengah pasang naik peran pasar dan lemahnya peran negara untuk emansipasi kelompok yang lemah, diperlukan peran partisipasi /solidaritas publik (dan civil

society) melalui lembaga yang kuat untuk mengawal sistem pendidikan kita (Sukarno 2005).

Kelima, Lemahnya Mental Masyarakat. Direktur Rumah Belajar Cinta Anak Bangsa (RBCAB) Firza Imam Putra⁷, menyatakan bahwa lebih dari 1,1 juta anak memilih berhenti belajar di sekolah selama tahun 2007. Artinya, setiap menit ada 4 anak putus sekolah di Indonesia. Salah satu faktor yang memengaruhi tingginya angka putus sekolah itu adalah dorongan orangtua dari keluarga tidak mampu. Anak kemudian dikondisikan untuk mencari uang dan menambah penghasilan keluarga. Masalah besar lainnya adalah kontroversi diadakannya Ujian Nasional (UN).

Bagaimana halnya dengan pemberlakuan sistem pendidikan baik di negara maju, seperti Firlandia, dimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dinilai memiliki nilai inovatif dan transformatif⁸, antara lain; satu, Seleksi guru yang ketat di negara Finlandia guru adalah profesi terhormat dan membanggakan. Guru adalah profesi yang diidamkan oleh para pemuda. Seleksi untuk mengajar di suatu sekolah sangat ketat. Calon guru dengan ijazah S-1 hanya 5% yang diterima dan calon guru dengan ijazah S-2 20% diterima. Dengan seleksi guru yang ketat, terjadilah guru-guru berkualitas. Dengan guru yang berkualitas maka akan tercipta pulalah pendidikan yang berkualitas.

Dua, Gaji tinggi, gaji guru di Finlandia adalah 40 juta perbulan. Hal tersebut mengantarkan gaji guru tertinggi ke-5 di dunia. Sebelum menjadi guru tentunya mereka harus masuk pada fakultas keguruan terlebih dahulu. Di Finlandia untuk masuk ke fakultas keguruan lebih sulit dibandingkan dengan masuk ke fakultas kedokteran.

Tiga, Pendidikan Anak Usia Dini, Otoritas pendidikan di Finlandia mempercayai 90% pertumbuhan otak terjadi pada usia balita, sehingga masa ini menjadi strategis untuk mengoptimalkan kerja otak. Finlandia terus mempersiapkan pendidikan anak untuk lebih baik. Pendidikan Anak Usia Dini adalah titik berat pendidikan di Finlandia. Mulai ajak Anak Anda ke PAUD.

Empat, Kurikulum yang Konsisten, Kurikulum di negara pendidikan terbaik di dunia ini telah sejak lama mempersiapkan kurikulum mereka. Pendidikan di Finlandia jarang mengganti kurikulum pendidikannya. Mereka terkesan tak mau coba-coba terhadap kurikulum yang baru. Dengan demikian tak akan terjadi kebingungan

antara guru dan murid, dan fokus pada tujuan pendidikan tercapai. Bagaimana dengan kurikulum pendidikan di Indonesia ? Semoga menjadi lebih baik.

Lima, Meminimalisir ujian, Pemerintah Finlandia percaya bila ujian banyak itu hanya akan memfokuskan siswa pada nilai sekedar lulus. Pendidikan Finlandia membimbing siswa untuk lebih mandiri, terampil, cerdas, dan kemampuan mencari informasi secara independen. Model pembelajaran di Finlandia mendorong siswa untuk lebih cerdas dan mandiri.

Enam, Tak Ada Ranking, Tak ada ranking membuat mental siswa Finlandia kuat. Seolah-olah tak ada diskriminasi, dan di Finlandia tak ada kelas unggulan. Penilaian didasarkan pada bagaimana mereka mengerjakan tugas, dan bukan pada benar atau salahnya jawaban. Penilaian didasarkan pada usaha mereka mengerjakan tugas. Program remedial adalah waktu siswa memperbaiki kesalahannya. Para siswa berusaha untuk membawa sekolah sebagai kegiatan yang menyenangkan.

Tujuh, Biaya Pendidikan ditanggung Negara, Biaya pendidikan di Finlandia ditanggung oleh negara. Dengan penduduk hanya 5 juta jiwa pemerintah mampu menanggung biaya pendidikan sebesar 200 ribu euro. Biaya tersebut per siswa hingga menuju perguruan tinggi. Jadi keluarga miskin dan kaya mampu merasakan kesempatan belajar yang sama.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendidikan merupakan institusi penting bagi proses penyiapan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mumpuni. Tanpa mempersiapkan masa depan generasi untuk hidup di era globalisasi (MEA, AEC, AFTA, dll) dengan berbagai unggulan kompetitif yang harus dimiliki, bangsa kita akan tenggelam dalam pecaturan dunia yang semakin global;
2. Solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini, diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme (*mazhab neoliberalisme*), yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan.

Serta penataan kembali Undang-Undang yang telah ada, sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia;

3. Standar pendidikan nasional harus diterapkan bebas nilai, bukan dengan memuat muatan politik praktis melalui pemberian wewenang yang jelas dan ke pada elemen pendidikan yang tepat.
4. Solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Seperti mutu guru, sarana fisik yang kurang memadai, misalnya, diberi solusi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kegiatan belajar dan mengajar;
5. Apabila Standar Nasional Pendidikan harus diterapkan secara total dan benar sesuai konsep. Maka harus melalui strategi advokasi yang tajam dan komitmen stakeholder secara menyeluruh. Selain itu juga dilakukan sosialisasi bagi komponen pendidikan dari tingkat nasional, propinsi hingga daerah kabupaten/kota, Lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat.

Penulis: Ali Akbarjono, M.Pd Candidat Doktor Prodi Manajemen Pendidikan UNJ, Dosen Tetap pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu

DAFTAR PUSTAKA

- Buletin, BSNP. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Dewantara, Ki Hadjar, 1945 [1963]. Karja Ki Hadjar Dewantara: Bagian Pertama: Pendidikan. Yogyakarta: Taman Siswa.
- <http://www.siperubahan.com/read/1473/Sistem-Pendidikan-Indonesia-VS-Sistem-Pendidikan-Finlandia>
- Murip Yahya, Pengantar Pendidikan, Prospect, Bandung, 2009.
- Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Putra, Firza Imam. artikel di Kompas edisi Kamis 17 Desember 2009
- Rembangy, Musthofa. 2010. Pendidikan Transformatif : pergulatan kritis merumuskan pendidikan di tengah pusaran arus globalisasi. Yogyakarta: Teras.

Sukarno, M., 2005: Refleksi Atas Beberapa Isu Kebijakan Pendidikan. Paper disampaikan pada Seminar Refleksi Akhir Tahun 2005 dengan tema "Satu Tahun Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono" diselenggarakan oleh Kedeputian IPSK-LIPI, Jakarta: Widya Graha Lt I, 13 Desember 2005

Surat Kabar, Kompas. Jakarta.

Surat Kabar, Sriwijaya Post. Jakarta.

Suyanto dan Djihad Hisyam, 2000. Pendidikan di Indonesia memasuki Milenium III: Refleksi dan reformasi. Yogyakarta: Adicita.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Fokus Media, Bandung, 2006.

¹Suyanto dan Djihad Hisyam, 2000. Pendidikan di Indonesia memasuki Milenium III: Refleksi dan reformasi. Yogyakarta: Adicita.

²Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

³Rembangy, Musthofa. 2010. Pendidikan Transformatif : pergulatan kritis merumuskan pendidikan di tengah pusaran arus globalisasi. Yogyakarta: Teras.

⁴Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

⁵Yahya Murip. 2009. Pengantar Pendidikan, Prospect, Bandung, 2009.

⁶Sukarno. 2005. Refleksi Atas Beberapa Isu Kebijakan Pendidikan. Paper disampaikan pada Seminar Refleksi Akhir Tahun 2005 dengan tema "Satu Tahun Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono" diselenggarakan oleh Kedeputian IPSK-LIPI, Jakarta: Widya Graha Lt I, 13 Desember 2005

⁷Putra, Firza Imam. artikel di Kompas edisi kamis 17 desember 2009

⁸<http://www.siperubahan.com/read/1473/Sistem-Pendidikan-Indonesia-VS-Sistem-Pendidikan-Finlandia>